

Politik Bahasa

Rumusan Seminar Politik Bahasa

Editor:
Hasan Alwi
Dendy Sugono

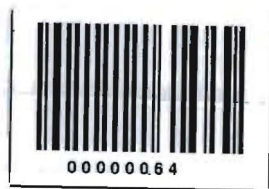
3
218
L



Pusat Bahasa
Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta

POLITIK BAHASA

Rumusan Seminar Politik Bahasa



POLITIK BAHASA

Rumusan Seminar Politik Bahasa

Editor
Hasan Alwi
Dendy Sugono



PUSAT BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2003

PERPUSTAKAAN PUSAT BAHASA	
Klasifikasi	No. Induk : 951
Pg	14/2003
499.218	Tgl. : 11
PDL	Ttd. : Eem
P	

KATA PENGANTAR

KEPALA PUSAT BAHASA

Ada tiga masalah kebahasaan di Indonesia, yaitu masalah bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan pemakaian bahasa asing. Ketiga masalah itu tidak terlepas dari kehidupan masyarakat pendukungnya. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah terjadi berbagai perubahan baik sebagai akibat tatanan kehidupan dunia yang baru, globalisasi, maupun sebagai dampak perkembangan teknologi informasi yang amat pesat. Kondisi ini telah mempengaruhi perilaku masyarakat Indonesia. Gerakan reformasi yang bergulir sejak 1998 telah mengubah paradigma tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tatanan kehidupan yang serba sentralistik telah berubah ke desentralistik, masyarakat bawah yang menjadi sasaran (objek) kini didorong menjadi pelaku (subjek) dalam proses pembangunan bangsa. Otonomi daerah telah diberlakukan dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun telah diatur dalam peraturan pemerintah. Urusan bahasa dan sastra Indonesia menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan urusan bahasa dan sastra daerah menjadi kewenangan pemerintah di daerah. Oleh karena itu, pengelolaan masalah kebahasaan dan kesastraan perlu disesuaikan dengan perkembangan tersebut. Sejalan dengan itu, Pusat Bahasa telah menghimpun pandangan tokoh/pakar untuk membahas masalah kebijakan pembinaan dan pengembangan bahasa dalam Seminar Politik Bahasa pada tahun 1999 yang lalu. Berbagai pokok persoalan yang dibahas beserta rumusan hasil seminar tersebut telah dihimpun dalam buku ini.

Dalam upaya peningkatan mutu sumber daya manusia, Presiden telah mencanangkan “Gerakan Nasional Peningkatan Mutu Pendidik-

an” pada tanggal 2 Mei 2002 dan disertai dengan gerakan “Pengembangan Perpustakaan” oleh Menteri Pendidikan Nasional serta disambut oleh Ikatan Penerbit Indonesia dengan “Hari Buku Nasional” pada tanggal 17 Mei 2002. Untuk menindaklanjuti berbagai upaya kebijakan tersebut, Pusat Bahasa perlu menerbitkan hasil pengembangan dan penelitian bahasa dan sastra untuk menyediakan bahan bacaan dalam rangka pengembangan perpustakaan dan peningkatan minat baca masyarakat.

Penerbitan kembali buku *Politik Bahasa* ini merupakan penyediaan buku bahan rujukan dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra di Indonesia. Penerbitan buku ini tentu tidak terlepas dari kerja sama yang baik dengan berbagai pihak, terutama para toko dan pakar yang telah menyumbangkan pikirannya dalam makalah yang termuat dalam buku ini. Untuk itu, kepada mereka saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Selain itu, kepada Penerbit Progres yang memungkinkan penerbitan buku ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sama. Kepada pengelola Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra, yaitu Utjen Djusen Ranabrata (Pemimpin), Tukiyar (Bendahara), Djamari (Sekretaris), Suladi, Haryanto, Budiono, Radiyo, Sutini (Staf) yang telah menerbitkan cetakan pertama saya sampaikan terima kasih.

Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya dalam memahami dan mengembangkan pengelolaan bahasa dan sastra di Indonesia.

Jakarta, 29 September 2003

Dr. Dendy Sugono

RUMUSAN SEMINAR POLITIK BAHASA

Cisarua, Bogor, Jawa Barat, 8-12 November 1999

Dengan mengacu (1) Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36, (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Seminar Politik Bahasa dalam sidang-sidangnya pada tanggal 8-12 November 1999 di Cisarua, Bogor, setelah mempertimbangkan:

1. Pidato Menteri Pendidikan Nasional,
2. Pidato Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa;

dan setelah membahas makalah:

1. "Fungsi Politik Bahasa" oleh Hasan Alwi;
2. "Otoritarianisme dan Distorsi Bahasa" oleh Eep Saefulloh Fatah;
3. "Bahasa Daerah sebagai Sarana Peningkatan Pemahaman Kondisi Kebhinekaan dalam Ketunggalikaan Masyarakat Indonesia: ke Arah Pemikiran dalam Mereposisi Fungsi Bahasa Daerah" oleh Mahsun;

4. "Kedudukan dan Fungsi Bahasa Asing" oleh Nuril Huda;
5. "Dinamika Sastra Indonesia dan Sastra Daerah" oleh Edi Sedyawati;
6. "Penelitian Bahasa dalam Kerangka Politik Bahasa" oleh Dede Oetomo;
7. "Hal-Hal yang Dipertimbangkan dalam Menyusun Kebijakan Penelitian Sastra dan Pengajarannya" oleh Yus Rusyana;
8. "Pengajaran Bahasa Asing: Gambaran Nyata dan Beberapa Gagasan Kebijakan" oleh Fuad Abdul Hamied;
9. "Sarana Uji Kemahiran Berbahasa sebagai Salah Satu Prasarana Pembangunan Bangsa" oleh Sugiyono dan A. Latief;
10. "Peningkatan Mutu Pengajaran Bahasa" oleh Bambang Kaswanti Purwo;
11. "Pengajaran Sastra dan Pemasyarakatan Sastra" oleh Budi Darma;
12. "Bahasa Koran, Radio, dan Televisi Perlu Pembenahan Menyeluruh" oleh Djafar H. Assegaff;
13. "Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Politik Bahasa Nasional" oleh Hans Lapoliwa

mengambil simpulan yang dirumuskan sebagai berikut.

A. UMUM

Kebijakan bahasa nasional yang digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan masalah kebahasaan di Indonesia hingga saat ini adalah hasil Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1975. Setelah melalui kurun waktu hampir 25 tahun, kebijakan bahasa nasional (1975) itu perlu ditinjau kembali sesuai dengan tuntutan perubahan dalam kehidupan masyarakat dan negara Indonesia dan tuntutan perubahan dunia internasional. Tuntutan-tuntutan perubahan itu timbul sebagai akibat kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dan globalisasi dalam hubungan antarbangsa.

Dalam hubungan dengan bahasa Indonesia, diperlukan penyesuaian tertentu di dalam kebijakan bahasa nasional. Bahasa

Indonesia lebih terbuka terhadap pengaruh teknologi informasi dan penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, di dalam pergaulan internasional di Indonesia. Dalam hubungan dengan perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia ke arah pemerintahan otonomi daerah serta pentingnya pembinaan dan pelestarian budaya daerah, bahasa daerah perlu memainkan peran yang lebih besar dan oleh karena itu, perlu memperoleh perhatian yang lebih luas dan mendalam. Meningkatnya penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, baik untuk keperluan pemerintahan maupun untuk keperluan dunia usaha, memerlukan perumusan kembali kedudukan dan fungsi bahasa asing itu serta pengajarannya di Indonesia.

Seminar Politik Bahasa yang diselenggarakan di Cisarua, Bogor pada tanggal 8-12 November 1999 merupakan salah satu langkah tindak lanjut untuk meninjau kembali hasil Seminar Politik Bahasa Nasional tahun 1975 dan diselenggarakan untuk memperkuat putusan Kongres Bahasa Indonesia VII tahun 1998 mengenai perlunya peningkatan kedudukan, fungsi, dan wewenang Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

B. PENGERTIAN DASAR

1. Kebijakan Bahasa Nasional

Politik bahasa nasional, yang selanjutnya disebut kebijakan bahasa nasional, adalah kebijakan nasional yang berisi pengarahannya, perencanaan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar pengelolaan keseluruhan masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. Keseluruhan masalah itu, merupakan jaringan masalah yang dijalin oleh (1) masalah bahasa dan sastra Indonesia, (2) masalah bahasa dan sastra daerah, dan (3) masalah bahasa asing di Indonesia.

Pengelolaan keseluruhan masalah bahasa itu memerlukan adanya satu kebijakan nasional yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga pengelolaan masalah bahasa-bahasa itu benar-benar berencana, terarah, dan menyeluruh.

2. Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang diikrarkan dalam

Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 dan yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36 sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dapat juga disebut bahasa nasional atau bahasa kebangsaan.

3. Bahasa Daerah

Bahasa daerah adalah bahasa yang dipakai sebagai bahasa perhubungan intradaerah atau intramasyarakat di samping bahasa Indonesia dan yang dipakai sebagai sarana pendukung sastra serta budaya daerah atau masyarakat etnik di wilayah Republik Indonesia. Bahasa-bahasa daerah merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup.

4. Bahasa Asing

Bahasa asing di Indonesia adalah semua bahasa, kecuali bahasa Indonesia, bahasa-bahasa daerah, dan bahasa serumpun Melayu. Bahasa asing yang berfungsi sebagai bahasa ibu warga negara Indonesia kelompok etnis tertentu tetap berkedudukan sebagai bahasa asing.

5. Sastra Indonesia

Sastra Indonesia adalah karya sastra berbahasa Indonesia dan merupakan bagian dari kebudayaan nasional.

6. Sastra Daerah

Sastra daerah adalah sastra berbahasa daerah dan merupakan unsur kebudayaan daerah yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional.

7. Sastra Asing

Sastra asing adalah sastra berbahasa asing dan merupakan bagian dari kebudayaan asing.

C. KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA DAN SASTRA

1. Kedudukan dan Fungsi Bahasa

Salah satu masalah kebahasaan yang perumusan dan dasar

penggarapannya perlu dicakup oleh kebijakan nasional di bidang kebahasaan adalah kedudukan dan fungsi bahasa. Yang dimaksud dengan kedudukan bahasa ialah status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya, yang dirumuskan atas dasar nilai sosial yang dihubungkan dengan bahasa yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan fungsi bahasa ialah peran bahasa yang bersangkutan di dalam masyarakat pemakainya.

a. Bahasa Indonesia

Salah satu kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional. Kedudukan ini dimiliki oleh bahasa Indonesia sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan dimungkinkan oleh kenyataan bahwa bahasa Melayu, yang mendasari bahasa Indonesia itu, telah dipakai sebagai *lingua franca* selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan Indonesia dan bahwa di dalam masyarakat Indonesia tidak terjadi "persaingan bahasa", yaitu persaingan di antara bahasa daerah yang satu dan bahasa daerah yang lain untuk mencapai kedudukan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional.

Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan nasional, (2) lambang identitas nasional, (3) alat pemersatu berbagai kelompok etnik yang berbeda latar belakang sosial budaya dan bahasanya, dan (4) alat perhubungan antarbudaya serta antardaerah.

Selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara, sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36: *Bahasa negara ialah bahasa Indonesia*.

Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, (3) bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional, (4) bahasa resmi untuk pengembangan kebudayaan nasional, (5) sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, (6) bahasa media massa, (7) pendukung sastra Indonesia, dan (8) pemer kaya bahasa dan sastra daerah.

b. Bahasa Daerah

Di dalam hubungan dengan kedudukan bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara, bahasa-bahasa di Indonesia, kecuali bahasa Indonesia, bahasa rumpun Melayu, dan bahasa asing, berkedudukan sebagai bahasa daerah. Kedudukan ini berdasarkan kenyataan bahwa bahasa daerah itu digunakan sebagai sarana perhubungan dan pendukung kebudayaan di daerah atau di dalam masyarakat etnik tertentu di Indonesia.

Bahasa daerah berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan daerah, (2) lambang identitas daerah, (3) alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, (4) sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia, serta (5) pendukung sastra daerah dan sastra Indonesia.

Di dalam hubungan dengan fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah berfungsi sebagai (1) pendukung bahasa Indonesia, (2) bahasa pengantar pada tingkat permulaan sekolah dasar di daerah tertentu untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan/atau pelajaran lain, dan (3) sumber kebahasaan untuk memperkaya bahasa Indonesia. Dalam keadaan tertentu, bahasa daerah dapat juga berfungsi sebagai pelengkap bahasa Indonesia di dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat daerah.

c. Bahasa Asing

Di dalam hubungan dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, bahasa selain bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa rumpun Melayu yang digunakan di Indonesia berkedudukan sebagai bahasa asing. Bahasa asing itu, baik yang digunakan dan diajarkan maupun yang di gunakan tanpa diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan tingkat tertentu, tidak bersaing dengan bahasa Indonesia baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara. Bahasa asing juga tidak bersaing dengan bahasa-bahasa daerah, baik sebagai lambang nilai sosial budaya maupun sebagai alat perhubungan masyarakat daerah.

Di dalam kedudukannya sebagai bahasa asing di Indonesia, bahasa-bahasa selain bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa

rumpun Melayu, berfungsi sebagai (1) alat perhubungan antarbangsa dan (2) sarana pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk pembangunan nasional. Bahasa-bahasa asing tertentu di Indonesia juga dapat memiliki fungsi lain. Bahasa Inggris merupakan bahasa asing yang diutamakan sebagai sumber pengembangan bahasa Indonesia, terutama dalam kaitan dengan pengembangan tata istilah keilmuan. Bahasa Arab juga berfungsi sebagai bahasa keagamaan dan budaya Islam. Apabila diperlukan, bahasa-bahasa asing lain juga dapat berfungsi sebagai sumber pemerayaan perbendaharaan kata bahasa Indonesia.

2. Kedudukan dan Fungsi Sastra

Sastra Indonesia merupakan salah satu bentuk pengungkap pemikiran tentang masyarakat baru Indonesia. Sastra daerah, yang di dalamnya telah direkam berbagai pengalaman yang berbeda, tetapi saling berinteraksi dan dalam beberapa hal saling mempengaruhi, telah ada dan berkembang jauh sebelum munculnya sastra Indonesia. Sastra Indonesia dan daerah, baik yang lama maupun yang baru, tidak terlepas dari pengaruh dan pertemuannya dengan kebudayaan dan sastra asing, khususnya sastra India, Arab, Persia, dan sastra-sastra Barat.

Dalam perkembangan selanjutnya, sastra Indonesia menjadi media ekspresi berbagai gagasan modern, pencerminan/pencarian jati diri untuk membangun kebudayaan baru yang diilhami baik oleh sumber-sumber kebudayaan tradisi maupun oleh kebudayaan modern. Sastra daerah berperan sebagai fondasi kebudayaan daerah, bahkan kebudayaan Nusantara, sebagai alat memperkuat budaya masyarakat di daerah, dan sebagai cermin pencarian jati diri masyarakat yang bersangkutan. Sastra asing merupakan salah satu sumber inspirasi bagi pengarang dan salah satu sumber untuk mengenal budaya asing.

Berdasarkan uraian di atas, kedudukan dan fungsi sastra Indonesia, sastra daerah, dan sastra asing dapat dirumuskan sebagai berikut.

a. Sastra Indonesia

Perasaan dan cita-cita nasional Indonesia telah diekspresikan

oleh pengarang Indonesia dalam bentuk puisi, roman, dan drama sebelum Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 1945, dan terus-menerus diutarakan dalam karya mereka setelah perang kemerdekaan. Oleh karena itu, sastra Indonesia sebagai bagian kebudayaan nasional berkedudukan sebagai wahana ekspresi budaya dalam upaya ikut memupuk kesadaran sejarah serta semangat dan solidaritas kebangsaan.

Dalam kedudukannya sebagai wahana ekspresi budaya, sastra Indonesia mempunyai fungsi untuk (1) menumbuhkan rasa kenasionalan, (2) menumbuhkan solidaritas kemanusiaan, dan (3) merekam perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia.

b. Sastra Daerah

Sastra daerah merupakan bukti historis kreativitas masyarakat daerah. Sehubungan dengan itu, sastra daerah sebagai salah satu bagian kebudayaan daerah berkedudukan sebagai wahana ekspresi budaya yang di dalamnya terekam antara lain pengalaman estetik, religius, atau sosial politik masyarakat etnis yang bersangkutan.

Dalam kedudukannya sebagai wahana ekspresi budaya, sastra daerah mempunyai fungsi untuk (1) merekam kebudayaan daerah dan (2) menumbuhkan solidaritas kemanusiaan.

c. Sastra Asing

Sastra asing yang merupakan bagian kebudayaan asing berkedudukan sebagai salah satu sumber inspirasi dan sumber pemahaman terhadap sebagian karya sastra di Indonesia, terutama dalam bidang penelitian. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sastra asing, terutama sastra India, Arab, Persia, Eropa, dan Amerika, akan sangat membantu upaya pengembangan sastra di Indonesia.

Dalam kedudukannya sebagai sumber inspirasi dan sumber pemahaman yang lebih komprehensif terhadap sastra Indonesia dan daerah, sastra asing mempunyai fungsi sebagai (1) pendorong penciptaan karya sastra di Indonesia, (2) sarana untuk lebih memahami sebagian sastra di Indonesia, (3) bahan kajian sastra bandingan, dan (4) penambah wawasan mengenai kebudayaan asing.

D. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA

Yang dimaksud dengan pembinaan dan pengembangan dalam hubungannya dengan masalah kebahasaan di Indonesia ialah usaha-usaha yang ditujukan untuk memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan pengajaran bahasa asing supaya dapat memenuhi fungsi dan kedudukannya.

1. Pembinaan

Yang dimaksud dengan pembinaan ialah upaya untuk meningkatkan mutu pemakaian bahasa. Usaha-usaha pembinaan itu mencakup upaya peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berbahasa yang dilakukan, antara lain, melalui pengajaran dan pemsyarakatan.

a. Pengajaran

1) Bahasa Indonesia (Termasuk BIPA)

Pengajaran bahasa Indonesia melalui sistem persekolahan dilakukan dengan mempertimbangkan bahasa sebagai satu keseluruhan berdasarkan konteks pemakaian yang ditujukan untuk peningkatan mutu penguasaan dan pemakaian bahasa yang baik dengan tidak mengabaikan adanya berbagai ragam bahasa Indonesia yang hidup dalam masyarakat. Peningkatan mutu pendidikan bahasa itu dilakukan melalui kegiatan berikut:

- a) pengembangan kurikulum bahasa Indonesia;
- b) pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan metodologi pengajaran bahasa;
- c) pengembangan tenaga kependidikan kebahasaan yang profesional;
- d) pengembangan sarana pendidikan bahasa yang memadai, terutama sarana uji kemahiran bahasa.

2) Bahasa Daerah

Pengajaran bahasa daerah ditujukan untuk meningkatkan mutu penguasaan dan pemakaian bahasa daerah yang dipelihara oleh masyarakat penuturnya. Peningkatan mutu pengajaran bahasa daerah

itu dilakukan melalui kegiatan berikut:

- a) pengembangan kurikulum bahasa daerah;
- b) pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan metodologi pengajaran bahasa;
- c) pengembangan tenaga kependidikan kebahasaan yang profesional;
- d) pengembangan sarana pendidikan bahasa yang memadai;
- e) penyediaan program pendidikan bahasa daerah di jenjang pendidikan tinggi setempat;
- f) penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di kelas permulaan pada jenjang pendidikan dasar.

3) Bahasa Asing

Pengajaran bahasa asing ditujukan kepada upaya penguasaan dan pemakaian bahasa asing, terutama untuk pemanfaatan ilmu dan teknologi dalam menyikapi persaingan bebas pada era globalisasi, agar lebih banyak orang Indonesia yang mampu memanfaatkan informasi dalam bahasa asing. Peningkatan mutu pengajaran bahasa asing dilakukan melalui kegiatan berikut:

- a) pengembangan kurikulum bahasa asing;
- b) pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dalam era global dan dengan perkembangan metodologi pengajaran bahasa;
- c) pengembangan tenaga pengajar bahasa asing yang profesional;
- d) pengembangan sarana pengajaran bahasa asing yang memadai;
- e) pemanfaatan teknologi informasi dalam bahasa asing.

Sesuai dengan sifat dan jenis pendidikan, pengajaran bahasa asing ada yang bersifat wajib dan ada yang pilihan. Mata pelajaran bahasa asing pilihan hendaknya diberikan sekurang-kurangnya 90 jam dalam satu tahun ajaran. Dalam hubungan dengan pengajaran bahasa asing, ada tiga kelompok bahasa asing yang perlu diperhatikan.

a) Bahasa Inggris

- 1) Pengajaran bahasa Inggris dapat diberikan mulai di sekolah dasar dengan syarat kesiapan sekolah yang benar-benar memadai.
- 2) Pengajaran bahasa Inggris di jenjang sekolah lanjutan tingkat pertama ditekankan pada penguasaan pengetahuan dasar yang diperlukan untuk dikembangkan di pendidikan yang lebih tinggi.
- 3) Pengajaran bahasa Inggris di jenjang sekolah lanjutan tingkat atas ditekankan pada perluasan pengetahuan dengan pengutamaan keterampilan.
- 4) Pengajaran bahasa Inggris di jenjang pendidikan tinggi ditekankan pada pemantapan keempat keterampilan bahasa (berbicara, mendengar, membaca, menulis) agar lulusan perguruan tinggi mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris, baik secara lisan maupun secara tertulis. Untuk itu, perlu dilakukan pelatihan intensif. Dalam hubungan itu, bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam mata kuliah tertentu (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 264/U/1999 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi).
- 5) Pemanfaatan penutur (asli) bahasa Inggris untuk pengajaran bahasa Inggris di Indonesia hendaknya didasarkan pada kebutuhan.

b) Bahasa Arab

- 1) Bahasa Arab diberikan sebagai mata pelajaran wajib pada sekolah yang berasaskan Islam.
- 2) Di sekolah yang tidak berasaskan Islam bahasa Arab dapat diberikan sebagai mata pelajaran pilihan pada jenjang pendidikan menengah.
- 3) Pada jenjang pendidikan tinggi bahasa Arab dapat diberikan sebagai mata kuliah.

c) Bahasa Asing Lain

Selain bahasa Inggris dan bahasa Arab, bahasa asing lain dapat diberikan sebagai mata pelajaran pilihan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

b. Pemasyarakatan

1) Bahasa Indonesia

Pemasyarakatan bahasa Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan sikap positif masyarakat (terutama kalangan pemerintahan dan kelompok profesi) terhadap bahasa Indonesia dan meningkatkan mutu penggunaannya. Pemasyarakatan bahasa Indonesia juga harus menjangkau kelompok yang belum dapat berbahasa Indonesia agar berperan lebih aktif dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih maju. Pemasyarakatan bahasa Indonesia ke seluruh lapisan masyarakat itu diarahkan pada upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pemasyarakatan bahasa Indonesia dilakukan dengan tidak meninggalkan kekayaan bahasa dan budaya Nusantara dengan tetap mengacu nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Untuk itu, pemasyarakatan bahasa Indonesia dilakukan melalui kegiatan berikut:

- a) penentuan prioritas kelompok sasaran;
- b) pengembangan bahan penyuluhan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran;
- c) pemanfaatan teknologi informasi dengan sebaik-baiknya;
- d) peningkatan kerja sama dengan semua pihak yang dapat memperlancar pemasyarakatan bahasa Indonesia di Indonesia;
- e) peningkatan mutu tenaga pemasyarakatan;
- f) pemanfaatan sarana uji kemahiran berbahasa Indonesia.

2) Bahasa Daerah

Pemasyarakatan bahasa daerah ditujukan pada upaya peningkatan sikap positif terhadap bahasa daerah dan penciptaan situasi yang kondusif dalam penggunaan bahasa daerah dengan mengacu nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Untuk itu, pemasyarakatan bahasa daerah dilakukan melalui kegiatan:

- a) pemberian dorongan penerbitan berbahasa daerah;
- b) pengikutsertaan tokoh masyarakat dan budayawan dalam pemasyarakatan penggunaan bahasa daerah dalam situasi tertentu;
- c) peningkatan peran masyarakat (kelompok seniman tradisional)

dalam memberikan informasi tentang penggunaan bahasa daerah.

2. Pengembangan

Yang dimaksud dengan pengembangan ialah upaya meningkatkan mutu bahasa agar dapat dipakai untuk berbagai keperluan dalam kehidupan masyarakat modern. Upaya pengembangan itu, antara lain, meliputi penelitian, pembakuan, dan pemeliharaan.

a. Penelitian

1) Bahasa Indonesia

- a) Penelitian dalam berbagai aspek bahasa Indonesia perlu dilakukan untuk kepentingan peningkatan mutu bahasa Indonesia.
- b) Penelitian berbagai bidang pemakaian bahasa Indonesia perlu dilakukan dalam upaya peningkatan mutu pemakaian bahasa Indonesia.

2) Bahasa Daerah

- a) Penelitian berbagai aspek bahasa daerah perlu dilakukan untuk kepentingan perekaman (inventarisasi) bahasa-bahasa daerah.
- b) Penelitian berbagai aspek bahasa daerah dan pemakaiannya perlu dilakukan untuk keperluan peningkatan mutu bahasa daerah yang dipelihara oleh penuturnya.

3) Bahasa Asing

- a) Penelitian terhadap bahasa asing di Indonesia perlu dilakukan untuk mencegah dampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Selain itu, penelitian terhadap bahasa asing dapat dimanfaatkan untuk memperkaya bahasa Indonesia.
- b) Penelitian pengajaran bahasa asing di Indonesia perlu dilakukan untuk keperluan peningkatan mutu pengajarannya.

b. Pembakuan

1) Bahasa Indonesia

Pembakuan bahasa Indonesia dilakukan dengan memperhatikan asas demokrasi dan keragaman bahasa Indonesia serta diarahkan untuk menciptakan komunikasi yang lebih luas dan efektif. Pembakuan itu dilakukan, antara lain, melalui penyusunan

- a) pedoman,
- b) kamus bahasa dan kamus bidang ilmu,
- c) tata bahasa,
- d) bahan pemyarakatan bahasa.

2) Bahasa Daerah

Pembakuan bahasa daerah dilakukan dengan memperhatikan keinginan masyarakat pendukungnya guna menciptakan komunikasi yang luas dan efektif di kalangan masyarakat pendukungnya. Pembakuan itu dilakukan, antara lain, melalui penyusunan

- a) pedoman,
- b) kamus bahasa,
- c) tata bahasa.

c. Pemeliharaan*

1) Bahasa Indonesia

- a) Pemeliharaan bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi modern yang terbuka dan dinamis.
- b) Pemeliharaan bahasa Indonesia dilakukan berdasarkan perkembangan sosiokultural dan konteks sosial, ekonomi, budaya, dan politik bangsa Indonesia.

2) Bahasa Daerah

- a) Pemeliharaan bahasa daerah terutama ditujukan pada bahasa daerah yang dipelihara oleh masyarakat penuturnya.

**) Sebagai peserta berpendapat kata pelestarian lebih cocok*

- b) Pendokumentasian bahasa-bahasa daerah yang terancam punah perlu diprioritaskan.

E. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SASTRA

Yang dimaksud dengan pembinaan dan pengembangan sastra adalah usaha-usaha yang diarahkan untuk memelihara dan mengembangkan sastra Indonesia dan daerah, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap sastra Indonesia dan daerah, serta memanfaatkan sastra asing supaya dapat memenuhi fungsi dan kedudukannya.

1. Pembinaan

Yang dimaksud dengan pembinaan ialah upaya untuk meningkatkan mutu apresiasi sastra. Upaya itu meliputi pengajaran, pemasyarakatan, dan pemberdayaan.

a. Pengajaran

Tujuan pengajaran sastra pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, sebagaimana yang tertera dalam kurikulum yang selama ini berlaku, tidak mungkin tercapai karena sampai saat ini pengajaran sastra merupakan bagian sangat kecil dari pengajaran bahasa. Di samping itu, ketersediaan guru dengan kelayakan yang memadai pun sangat terbatas. Oleh karena itu, metode pengajarannya sering kurang tepat, sementara pemanfaatan bahan ajar yang tersedia belum dapat dilakukan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, pengajaran sastra hendaknya

- 1) tidak lagi merupakan bagian dari pengajaran bahasa;
- 2) didukung dengan pengadaan guru yang berkelayakan mengajarkan sastra;
- 3) didukung ketersediaan karya sastra yang memadai di sekolah;
- 4) diupayakan agar sastrawan atau tokoh kritik sastra, baik lokal maupun nasional, lebih banyak dimanfaatkan, antara lain, melalui kegiatan tatap muka dengan guru sastra dan siswa.
- 5) didukung dengan kegiatan ekstrakurikuler.

b. Pemasyarakatan

1) Sastra Indonesia

Pemasyarakatan sastra Indonesia dimaksudkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap sastra Indonesia. Pemasyarakatan sastra Indonesia sebaiknya menjangkau kelompok yang belum mampu berbahasa Indonesia dengan baik seiring dengan upaya pemasyarakatan bahasa Indonesia. Pemasyarakatan sastra Indonesia ke seluruh lapisan masyarakat itu diarahkan untuk menunjang keberhasilan upaya pemasyarakatan bahasa Indonesia. Pemasyarakatan sastra Indonesia dilakukan dengan tetap memperhatikan dan memanfaatkan kekayaan sastra Nusantara, antara lain, mengacu pada nilai-nilai budaya masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, pemasyarakatan sastra Indonesia hendaknya mempertimbangkan hal berikut.

- a) Untuk peningkatan apresiasi masyarakat terhadap sastra Indonesia, penerbitan karya sastra perlu digalakkan, antara lain lewat edisi karya sastra yang disederhanakan untuk siswa pendidikan dasar. Selain itu, berbagai cara dapat ditempuh, misalnya memperkenalkan sastrawan terkemuka, antara lain melalui penggunaan gambar sastrawan besar pada uang, perangko, kalender, buku ajar, dan buku tulis.
- b) Pemasyarakatan sastra tidak hanya dilakukan dalam masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia. Oleh karena itu, penerjemahan karya sastra Indonesia, ke dalam bahasa-bahasa internasional perlu digalakkan.
- c) Pemasyarakatan sastra Indonesia dalam, dunia internasional juga dapat dilaksanakan dengan mendorong keikutsertaan dan/atau penampilan sastrawan, kritikus, dan tokoh sastra Indonesia dalam pertemuan-pertemuan internasional.
- d) Pemasyarakatan sastra hendaknya diupayakan agar dapat memantapkan kedudukan dan meningkatkan fungsi sastra dalam kehidupan masyarakat. Hal itu diharapkan dapat memberdayakan tiga komponen utama kehidupan sastra, yaitu sastrawan, karya sastra, dan masyarakat.

2) Sastra Daerah

Pemasyarakatan sastra daerah ditujukan pada upaya peningkatan kesadaran akan peran sastra daerah dalam kehidupan masyarakat daerah yang bersangkutan, terutama dalam menghadapi tantangan era globalisasi. Dalam hubungan itu, pemasyarakatan sastra daerah hendaknya ditujukan pada penciptaan situasi yang memungkinkan sastra daerah tetap hidup dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dengan tidak meninggalkan nilai budaya daerah yang bersangkutan. Berdasarkan hal itu, pemasyarakatan sastra daerah hendaknya mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a) Pemasyarakatan sastra daerah dalam masyarakat Indonesia dapat dilakukan, antara lain, dengan menerjemahkan karya-karya sastra daerah ke dalam bahasa Indonesia.
- b) Pemasyarakatan sastra daerah tidak hanya dilakukan dalam masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia. Oleh karena itu, penerjemahan karya sastra daerah ke dalam bahasa-bahasa internasional perlu digalakkan.
- c) Pemasyarakatan sastra hendaknya diupayakan agar dapat memantapkan kedudukan dan meningkatkan fungsi sastra dalam kehidupan masyarakat. Hal itu diharapkan dapat memberdayakan tiga komponen utama kehidupan sastra, yaitu sastrawan, karya sastra, dan masyarakat.

c. Pemberdayaan

Pemberdayaan sastra ditujukan kepada pemantapan kedudukan dan peningkatan fungsi sastra dalam kehidupan masyarakat. Dengan mantapnya kedudukan dan meningkatnya fungsi sastra dalam kehidupan masyarakat, diharapkan karya sastra yang bermutu akan lahir di tengah masyarakat yang sadar sastra.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia modern upaya tersebut makin dirasakan penting dan mendesak karena hingga saat ini kegiatan bersastra dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat makin lemah. Sehubungan dengan kenyataan itu, komponen utama kehidupan sastra, yakni sastrawan, karya sastra, dan masyarakat, perlu lebih

mendapat perhatian secara sungguh-sungguh. Karya sastra berraut lebih mungkin tercipta jika penciptanya dapat berkarya dalam situasi dan suasana yang baik (memungkinkan lahirnya karya yang bermutu). Kebebasan berekspresi, perlindungan hak cipta, dan penghargaan yang memadai, antara lain, merupakan prasyarat lahirnya sastra yang bermutu. Dukungan masyarakat luas yang berupa apresiasi sastra akan merangsang pertumbuhan sastra yang lebih subur dan bermutu. Dengan mempertimbangkan pokok-pokok tersebut, pemberdayaan dapat dilakukan, antara lain, melalui hal-hal berikut:

- 1) Sastrawan perlu memperoleh perlindungan hak cipta, kebebasan berekspresi, dan penghargaan yang baik dari masyarakat.
- 2) Kritik sastra perlu disebarluaskan sehingga masyarakat dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan karya sastra.
- 3) Karya sastra yang bermutu yang belum dapat dinikmati oleh kalangan tertentu, seperti siswa pendidikan dasar, perlu disesuaikan sedemikian rupa agar dapat lebih mudah mereka serap.
- 4) Apresiasi sastra masyarakat luas perlu diberdayakan, antara lain, melalui pengembangan komunitas sastra.
- 5) Peningkatan sarana kehidupan sastra, seperti publikasi dan dokumentasi sastra, komunitas sastra, dan pusat-pusat kegiatan sastra perlu lebih diperhatikan.

Kesadaran masyarakat akan peran sastra dalam kehidupan masyarakat modern perlu digalakkan. Dalam hal ini media massa dan pendidikan sekolah akan sangat membantu menumbuhkan kesadaran itu. Peran serta pemerintah dalam mendukung terbentuknya masyarakat sadar sastra dapat diwujudkan, antara lain melalui penyediaan fasilitas, seperti perpustakaan keliling dan keringanan harga buku, yang memungkinkan karya sastra yang bermutu dapat dibaca/dibeli oleh masyarakat dengan mudah dan murah.

2. Pengembangan

Yang dimaksud dengan pengembangan ialah upaya meningkatkan mutu sastra agar dapat dimanfaatkan sebagai media ekspresi, pencerminan dan pencarian jati diri untuk membangun kebudayaan baru, dan sebagai

sarana peningkatan kepedulian terhadap kehidupan masyarakat. Upaya pengembangan sastra itu meliputi penelitian dan pemeliharaan.

a. Penelitian

Komunitas sastra Indonesia dan komunitas sastra daerah merupakan satu komunitas sastra se-Indonesia. Komunitas sastra se-Indonesia merupakan pula bagian dari komunitas sastra yang lebih luas, seperti komunitas sastra Asia Tenggara, komunitas sastra Asia, dan komunitas sastra dunia. Terhadap komunitas sastra seperti itu perlu dilakukan penelitian yang lebih terencana dan terarah.

Kehidupan sastra Indonesia dan sastra daerah tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan asing. Untuk memahami sastra Indonesia dan sastra daerah yang lebih baik, perlu pula dilakukan penelitian terhadap sastra asing yang relevan. Penelitian sastra itu dilakukan juga untuk pengembangan teori sastra dan peningkatan mutu karya sastra.

1) Sastra Indonesia

Penelitian sastra Indonesia dilakukan untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang sastra Indonesia, termasuk sejarah sastra (sastrawan, tokoh sastra, aliran dalam sastra, dan sebagainya), serta peran sastra dalam kaitannya dengan upaya pengembangan bahasa Indonesia.

2) Sastra Daerah

Penelitian sastra daerah ditujukan kepada pemerolehan informasi tentang setiap sastra daerah dan keseluruhan sastra daerah se-Indonesia sebagai satu komunitas sastra. Penelitian tersebut dapat dilakukan, antara lain, melalui telaah perbandingan, telaah kesejarahan, dan telaah tipologi sastra dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, seperti pemerintah daerah setempat dan Pemerintah Pusat.

3) Sastra Asing

Penelitian sastra asing dilakukan untuk lebih memahami sastra Indonesia dan sastra daerah, terutama yang telah mengalami kontak

dengan sastra asing. Selain itu, penelitian sastra asing juga dapat dimanfaatkan untuk memacu peningkatan mutu karya sastra Indonesia dan sastra daerah. Sastra asing yang diteliti ialah sastra klasik India, Arab, dan Persia serta sastra modern seperti sastra Eropa, sastra Amerika, dan sastra Asia.

b. Pemeliharaan

Pemeliharaan karya sastra, yang selama ini dikenal sebagai pelestarian sastra lama, adalah upaya yang ditujukan agar generasi baru Indonesia dapat memahami, menghayati karya sastra tersebut, terutama pesan yang terkandung di dalamnya, baik karya sastra Indonesia maupun karya sastra daerah, lama ataupun baru. Pemahaman terhadap karya sastra akan lebih mudah dicapai jika suatu generasi dapat mengalami peristiwa kehidupan sastra itu sendiri. Oleh karena itu, upaya pemeliharaan karya sastra dapat dilakukan melalui pemeliharaan tradisi bersastra di masyarakat, seperti pemeliharaan sastra lisan, pembacaan (pengembangan) naskah lama, dan penuturan dongeng.

F. SARANA

Yang dimaksud dengan sarana dalam kaitannya dengan kebijakan bahasa nasional ialah kelengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Sarana itu sekurang-kurangnya mencakup hal-hal berikut.

1. Ketentuan Perundang-undangan

Hingga saat ini undang-undang tentang kebahasaan belum ada. Oleh karena itu, ketentuan perundang-undangan tentang kebijakan bahasa nasional dirasakan makin diperlukan. Hal ini sangat penting untuk menjamin keterikatan semua pihak yang terkait dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

2. Organisasi

Pusat Bahasa merupakan organisasi Pemerintah yang diberi tanggung jawab mengelola kebijakan nasional di bidang kebahasaan dan

kesastraan. Akan tetapi, mengingat kedudukan Pusat Bahasa selama ini sebagai instansi pemerintah eselon II di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, maka kewenangan dan kewibawaannya menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, tidak mengherankan hasil pengelolaannya selama ini belum memuaskan. Dalam hubungan ini, pada berbagai pertemuan kebahasaan terutama sejak Kongres Bahasa Indonesia III tahun 1978 hingga Kongres Bahasa Indonesia VII tahun 1998 ketepatan kedudukan dan fungsi Pusat Bahasa sebagai Eselon II di Departemen Pendidikan Nasional selalu dipertanyakan. Dengan kata lain, Pusat Bahasa selalu direkomendasikan agar menjadi lembaga pemerintah nondepartemen (informasi lebih lengkap akan dibahas tersendiri di bawah judul "kelembagaan").

3. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia

Pembangunan bangsa atau pembangunan nasional akan lebih terjamin keberhasilannya jika seluruh warga negara Indonesia ikut berpartisipasi aktif. Partisipasi itu sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman warga masyarakat terhadap rencana pembangunan yang ada. Mengingat pembangunan nasional itu disusun dalam bahasa Indonesia, sedangkan tingkat kemahiran berbahasa Indonesia anggota masyarakat sangat beragam, bahkan ada yang masih buta bahasa Indonesia, maka tentulah usaha pertama yang perlu dilakukan ialah meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia para warga masyarakat itu melalui jalur pendidikan nasional, pelatihan, penataran, penyuluhan, dan sebagainya. Hal tersebut perlu ditempuh agar tingkat kemahiran berbahasa Indonesia seseorang sesuai dengan tuntutan pekerjaan, jabatan, profesi, dan lain-lain yang akan dilakukannya. Tingkat kemahiran berbahasa Indonesia ini perlu pula dipersyaratkan kepada tenaga kerja asing pada umumnya. Berdasarkan keperluan itu, terutama dalam globalisasi, ketersediaan sarana uji kemahiran berbahasa Indonesia merupakan suatu keharusan yang perlu segera diupayakan agar warga negara Indonesia dapat lebih produktif dan memiliki daya saing yang lebih baik.

4. Jaringan Informasi

Iptek tidak akan mungkin berkembang dengan baik jika tidak didukung oleh informasi yang baik mengenai keadaan yang ada. Demikian pula halnya dengan bahasa dan sastra. Oleh karena itu, ketersediaan jaringan informasi kebahasaan dan kesastraan yang memungkinkan orang untuk memperoleh, menghimpun, dan menyebarkan informasi tersebut merupakan suatu keharusan. Dalam hubungan ini, perpustakaan yang modern dan canggih merupakan salah satu mata jaringan informasi kebahasaan dan kesastraan yang diperlukan.

5. Penerjemahan

Sejarah telah membuktikan bahwa Jepang dapat menjadi negara maju dalam waktu yang relatif singkat, antara lain karena memiliki program nasional penerjemahan yang berhasil. Berdasarkan perhitungan dari berbagai segi, program penerjemahan ternyata relatif lebih murah jika dibandingkan dengan program lain untuk tujuan yang sama, seperti program pendidikan untuk para sarjana dan masyarakat luas untuk menguasai bidang ilmu dan bahasa asing yang diperlukan itu. Oleh karena itu, program nasional penerjemahan yang telah dirintis pada tahun 1970-an perlu ditata ulang dengan perencanaan yang lebih mantap. Penerjemahan juga sangat diperlukan untuk memperkenalkan bangsa dan budaya Indonesia di dunia internasional melalui terjemahan karya sastra Indonesia dan daerah.

6. Penghargaan

Jika dibandingkan dengan bidang-bidang lain, seperti lingkungan hidup, olahraga, dan manajemen, prestasi dalam bidang bahasa dan sastra, baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah, hampir-hampir terlupakan untuk diberi penghargaan. Penghargaan yang layak dari Pemerintah dan masyarakat terhadap prestasi dalam bidang bahasa dan sastra itu akan mendorong lahirnya karya-karya yang lebih besar. Dalam bidang karya-karya besar sering dianggap sebagai pencerminan bangsa yang besar. Di samping itu, karya-karya besar akan merangsang masyarakat untuk lebih mencintai bahasa dan sastra.

7. Kerja Sama

Agar dapat mengembangkan dan memutakhirkan kajian bahasa dan sastra di Indonesia, Pusat Bahasa hendaknya dapat menggalang kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian, baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, Pusat Bahasa juga perlu meningkatkan kerja sama dengan pihak lain, seperti pemerintah daerah dan organisasi profesi serta instansi yang berhubungan dengan upaya pemasyarakatan bahasa dan sastra.

8. Sumber Daya Manusia

Untuk mengembangkan sumber daya manusia, Pusat Bahasa harus mempunyai sistem pengembangan profesionalisme peneliti bahasa dan sastra di Indonesia secara menyeluruh. Pusat Bahasa tidak hanya bertanggung jawab dalam mengembangkan profesionalisme karyawan-karyawannya, tetapi juga sumber daya kebahasaan lain yang menyebar di berbagai institusi di Indonesia. Untuk itu, Pusat Bahasa hendaknya memanfaatkan perguruan tinggi atau lembaga-lembaga diklat yang tepat untuk kualifikasi yang diperlukan.

G. KELEMBAGAAN

Kelembagaan menyangkut badan atau organisasi, baik pemerintah maupun nonpemerintah yang bertanggung jawab atas penanganan masalah kebahasaan dan kesastraan Indonesia dan daerah serta asing, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

1. Lembaga Pemerintah

Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab secara khusus untuk menangani masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia terdiri atas lembaga kebahasaan tingkat pusat (nasional) dan lembaga kebahasaan tingkat daerah.

a. Lembaga Kebahasaan Tingkat Pusat

Lembaga kebahasaan tingkat pusat mempunyai tugas untuk menangani masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia dan berfungsi

- 1) melaksanakan upaya pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia;
- 2) mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah;
- 3) merumuskan pokok-pokok kebijakan nasional di bidang kebahasaan dan kesastraan;
- 4) mengembangkan sistem informasi kebahasaan;
- 5) mengembangkan kerja sama kebahasaan dan kesastraan dengan berbagai pihak yang relevan, terutama lembaga pendidikan tinggi, pemerintah daerah, dan organisasi profesi.
- 6) memantau pengajaran bahasa Indonesia untuk pembelajar asing.

b. Lembaga Kebahasaan Tingkat Daerah

Lembaga kebahasaan tingkat daerah mempunyai tugas untuk menangani masalah kebahasaan dan kesastraan di daerah dengan fungsi

- 1) melaksanakan upaya pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia di daerah sesuai dengan pokok-pokok kebijakan nasional di bidang kebahasaan dan kesastraan;
- 2) melaksanakan pengembangan dan/atau pembinaan bahasa dan sastra daerah;
- 3) mengembangkan sistem informasi kebahasaan di daerah.

c. Lembaga Kebahasaan di Luar Negeri

Lembaga kebahasaan di luar negeri merupakan lembaga yang bertugas untuk menangani masalah bahasa dan sastra Indonesia (dan daerah) di luar negeri dan berfungsi

- 1) menyebarluaskan informasi kebahasaan dan kesastraan Indonesia dan daerah kepada masyarakat luar negeri;
- 2) menyelenggarakan dan/atau memantau pengajaran bahasa Indonesia untuk pembelajar asing di luar negeri;
- 3) mengembangkan kerja sama kebahasaan dengan pihak asing;
- 4) memperkenalkan budaya bangsa melalui kegiatan kebahasaan dan kesastraan.

2. Lembaga Nonpemerintah

Lembaga nonpemerintah, baik yang langsung maupun yang tidak langsung berkaitan dengan kebahasaan dan kesastraan, antara lain, ialah organisasi profesi.

Organisasi profesi adalah organisasi yang terbentuk berdasarkan kesamaan profesi seperti Persatuan Wartawan Indonesia, Ikatan Penerbit Indonesia, dan Himpunan Penerjemah Indonesia, terutama Himpunan Pembina Bahasa Indonesia, Masyarakat Linguistik Indonesia, Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia. Organisasi-organisasi itu berkewajiban membantu dalam bidang kebahasaan dan kesastraan:

- a. melakukan kegiatan kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan pokok-pokok kebijakan nasional di bidang kebahasaan dan kesastraan;
- b. memasyarakatkan hasil pengembangan bahasa dan sastra;
- c. meningkatkan kerja sama dengan lembaga bahasa di tingkat pusat dan daerah.



F
499
P